

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian sebelumnya**

Penelitian ini sebelumnya pernah dilakukan Chtorou et al. (2001)-dalam penelitiannya yang menguji apakah praktik corporate governance mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas informasi keuangan yang dipublikasikan- menyimpulkan bahwa penerapan prinsip GCG akan menjadi kendala (constrain) aktivitas earnings management. Penelitian tersebut menggunakan discretionary accruals sebagai proksi rekayasa yang dilakukan manajemen. Beasley et al. (1996) dan Abbott et al. (2000) yang menduga ada hubungan antara penerapan corporate governance dengan berkurangnya kecurangan pada pelaporan keuangan (financial reporting) membuktikan meningkatnya kualitas laporan keuangan karena penerapan prinsip tersebut secara konsisten.

Banyak penelitian yang menguji hubungan antara karakteristik komite audit (*committee audit*) dan dewan komisaris (*board for directors*) syarat penting dalam GCG dengan upaya earnings management sebagai ukuran keberhasilan penerapan GCG (Chtourou et.al,2001) Carcello & Neal (2000) dengan adanya hubungan positif antara komite tersebut dengan berkurangnya tekanan manajemen terhadap komite audit pada saat menyusun laporan keuangan. Selain kompetensi dan aktivitas komite audit. Sehingga dapat dikatakan bahwa independensi komite audit mempunyai hubungan positif dengan level rekayasa keuangan yang dilakukan manajemen

(Westphal & Zajac, 1997). Sejalan dengan kesimpulan tersebut, Dezoort & Salterio (2001) juga menyimpulkan bahwa komite audit akan mempunyai pengaruh yang positif terhadap rekayasa keuangan yang dilakukan manajemen.

Sementara dengan menguji kompetensi anggota komite audit, McMullen & Rangdhun (1996) menyimpulkan adanya hubungan positif antara kompetensi tersebut dengan menurunnya kemungkinan dilakukannya earnings manajemen. Atau dengan kata lain, semakin kompeten komite audit akan semakin mengurangi kemungkinan praktik rekayasa keuangan yang dilakukan manajemen

Selain komite audit, dewan komisaris (*board for director*) juga merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam menyediakan laporan keuangan yang reliable. Sehingga secara teoritis keberadaan dewan ini akan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan dipakai sebagai tingkat rekayasa yang dilakukan manajemen (Chtourou et al. 2001). Sejalan dengan hal tersebut Beasley (1996) dan Abbotts et al (2000) menguji apakah besarnya dewan komisaris (*board size*) mempunyai hubungan yang positif dengan kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Penelitian tersebut tidak menemukan hubungan antara kedua hal tersebut, karena semakin besar dewan direktur semakin tidak efisien dan semakin lemah kontrolnya terhadap manajemen. Lebih lanjut dewan komisaris yang independensi secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajemen (Chtourou et al., 2001). Beasley (1996) juga menemukan hubungan negative antara besarnya non-executif members dengan

tingkat kecurangan tersebut. Sehingga secara singkat dapat dikatakan ada hubungan negative antara proporsi independensi dewan komisaris dengan level manipulasi yang dilakukan manajemen. Demikian juga kompetensi dewan komisaris yang mempunyai hubungan negative dengan level manipulasi tersebut. Atau dengan kata lain, semakin kompeten dewan komisaris, semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan variable yang digunakan. Pada penelitian terdahulu variabel yang digunakan yaitu menggunakan discretionary accruals sebagai proksi rekayasa keuangan yang dilakukan manajemen. Discretionary accruals merupakan selisih antara total accruals dan nondiscretionary accruals. Sedangkan total accruals merupakan selisih antara net income dan cash flow from operations. Total akrual dipecah menjadi komponen discretionary accruals dan nondiscretionary accruals dengan menggunakan modified Jones model (Dechow et al., 1995)

Sedangkan pada penelitian sekarang memiliki variabel bebas kinerja keuangan, dan variabel terikat, ukuran KAP, komite audit independen, proporsi Dewan Komisaris Independen dan keberadaan komite audit, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dummy variabel.

## **2.2.Kinerja Keuangan**

### **2.2.1.Pengertian Kinerja Keuangan**

Terdapat berbagai teknik analisis, termasuk berbagai rasio keuangan yang dapat dipergunakan untuk melakukan penilaian kinerja sebuah perusahaan. Namun manfaat yang sebenarnya dari setiap rasio sangat ditentukan untuk tujuan spesifik analisis dan rasio-rasio itu bukan merupakan kriteria yang mutlak. Rasio-rasio yang bermanfaat dapat menunjukkan perubahan kondisi keuangan atau kinerja operasi dan membantu menggambarkan kecenderungan serta pola perubahan tersebut.

Penilaian kinerja melalui laporan keuangan yang didasarkan pada data dan kondisi masa lalu sulit untuk mengekstrapolasikan ekspektasi masa depan dan tidak ada rasio untuk menilai kinerja perusahaan yang dapat memberi jawaban yang mutlak. Setiap pandangan yang diperoleh bersifat relative, karena kondisi dan operasi perusahaan sangat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dari satu industri ke industri lain. Perbandingan dan standar berdasarkan kinerja masa lalu merupakan hal yang sangat sulit dalam perusahaan yang sangat besar, multi usaha dan konglomerat, dimana informasi spesifik menurut setiap lini usaha biasanya terbatas, (Helfert, 1997;68)

### **2.2.2.Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan**

Daya tarik utama bagi pemilik perusahaan pemegang saham dalam suatu perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas, berarti hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan oleh pemilik. Pemilik juga tertarik pada

pembagian laba yang menjadi haknya, yaitu seberapa banyak yang diinvestasikan kembali dan seberapa banyak yang dibayarkan sebagai deviden kepada mereka dan pemilik juga berkepentingan dengan dampak hasil perusahaan terhadap nilai perusahaan investasi mereka, khususnya jika saham dijual kepada umum.

Sedangkan bagi pemberi pinjaman tertarik untuk meminjamkan dana kepada suatu perusahaan yang berhasil yang berjalan seperti apa yang diharapkan. Pada saat yang sama mereka harus mempertimbangkan konsekuensi negative seperti kegagalan dan likuidasi. Meskipun tidak memperoleh imbalan apapun dari keberhasilan perusahaan kecuali menerima pembayaran bunga dan pokok pinjaman secara teratur, pemberi pinjaman harus menilai dengan cermat resiko pengambilan dana tersebut seperti awal yang diberikan, khususnya jika dana tersebut disediakan untuk jangka panjang.

Menurut Helfret ( 1997;70) bagi pihak manajemen mempunyai kepentingan ganda dalam analisis kinerja keuangan yaitu, menilai efisiensi dan profitabilitas operasi, serta menimbang seberapa efektif penggunaan sumber daya perusahaan. Penilaian atas operasi sebagian besar dilakukan berdasarkan analisis diatas laporan laba-rugi. Sedangkan efektifitas penggunaan sumber daya biasanya diukur dengan pertimbangan ekonomi, kita harus selalu memodifikasidata keuangan yang tersedia untuk mencerminkan nilai dan kondisi ekonomi saat ini.

### 2.2.3. Perencanaan Keuangan

Ide yang baik, produk yang baik, dan etos kerja yang baik saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis tanpa tersedianya dana. Dana tidak tersedia dengan sendirinya melainkan dapat diperoleh melalui perencanaan keuangan (*financial planning*) yang baik (Eakins 2002). Perencanaan keuangan merupakan pekerjaan yang tidak mudah dilakukan karena meliputi kegiatan menentukan estimasi atas kejadian dimasa depan. Oleh karena itu dalam menyusun perencanaan keuangan dibutuhkan berbagai sumber informasi baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Menyusun perencanaan keuangan membutuhkan banyak tahapan yaitu:

1. Menentukan angka pertumbuhan perusahaan. Dengan angka pertumbuhan yang ditetapkan akan dapat diperoleh angka jumlah produk atau jasa yang dijual kepada pelanggan.
2. Menentukan aktiva yang dibutuhkan untuk mendukung penjualan (*assets requirement*). Dalam tahapan ini ditentukan aktiva yang dibutuhkan baik aktiva lancar atau modal kerja maupun aktiva jangka panjang seperti tanah, bangunan, mesin dan sebagainya. Kemudian perusahaan menentukan laba maupun arus kas yang dihasilkan atas aktiva tersebut selama periode aktiva tersebut digunakan. Tahapan ini disebut analisa keputusan investasi (*investing decisions*)
3. Menentukan sumber dana yang akan digunakan untuk mendanai investasi atas aktiva perusahaan. Dalam tahap ini perusahaan menganalisis alternatif pendanaan baik melalui pinjaman bank, penerbitan obligasi dan saham, memanfaatkan modal ventura, pemanfaatan laba ditahan dan lain sebagainya. Kemudian melakukan

perhitungan biaya penggunaan dana atas sumber dana yang dipilih. Tahapan ini disebut analisis keputusan pembiayaan (*financing decisions*)

4. Melakukan analisis teknik penganggaran modal (*capital budgeting*) untuk menentukan layak tidaknya perencanaan keuangan dilakukan. Dalam analisis ini akan dilihat sampai sejauh mana tingkat pengembalian atas aktiva dapat menutup biaya penggunaan dana. Tahapan ini merupakan integrasi analisis keputusan investasi dan keputusan pembiayaan.

#### 2.2.4. Pertumbuhan Perusahaan

Perencanaan keuangan menekankan pada perusahaan untuk memikirkan tentang tujuan yang hendak dicapai. Tujuan organisasi seringkali diekspresikan dalam bentuk pertumbuhan, sehingga banyak perusahaan menentukan tingkat pertumbuhan sebagai komponen utama dalam perencanaan keuangan, dengan demikian ada hubungan langsung antara pertumbuhan perusahaan dengan kebijakan keuangan, oleh karena itu pertumbuhan dipandang sebagai tujuan manajemen keuangan (Ross and Jordan 1998). Banyak perusahaan memasang angka pertumbuhan dengan hanya mendasarkan pada permintaan pasar tanpa memperhatikan kebijakan keuangan, sehingga banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan karena pertumbuhan yang ditetapkan sendiri. Pertumbuhan perusahaan akan membawa konsekuensi terhadap keputusan keuangan di bidang investasi dan keputusan pembiayaan. Secara keuangan, tingkat pertumbuhan dapat ditentukan dengan mendasarkan pada kemampuan keuangan perusahaan. Tingkat pertumbuhan yang

ditentukan dengan hanya melihat kemampuan keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tingkat pertumbuhan atas kekuatan sendiri (*internal growth rate*) dan tingkat pertumbuhan berkesinambungan (*sustainable growth rate*). *Internal growth rate* merupakan tingkat pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa membutuhkan dana eksternal atau tingkat pertumbuhan yang hanya dipicu oleh tambahan atas laba ditahan. Secara matematis, *internal growth rate* atau disingkat IGR dapat dihitung dengan  $(ROI \times b) / 1 - (ROI \times b)$ , dimana ROI atas *Return on Investment* dan b adalah persentase laba yang ditahan dalam perusahaan. *Sustainable growth rate* adalah tingkat pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa melakukan pembiayaan modal tetap dengan memelihara perbandingan antara hutang dengan modal (*debt to equity ratio*). Secara matematis *sustainable growth rate* atau disingkat SGR dapat dihitung dengan  $(ROE \times b) / 1 - (ROE \times b)$ , dimana ROE adalah *Return on Equity* dan b adalah persentase laba yang ditahan dalam perusahaan (Ross and Jordan 1998). Angka IGR selalu lebih rendah dibanding angka SGR, karena IGR tidak memperkenankan penambahan hutang jangka panjang atau penerbitan surat hutang, sedangkan SGR mengizinkan penambahan hutang jangka panjang atau penerbitan surat hutang secara proposional dengan penambahan modal yang berasal laba yang diperoleh yang ditahan dalam perusahaan. Dari dua angka pertumbuhan tersebut yang digunakan banyak perusahaan adalah SGR karena angka SGR lebih besar sehingga perusahaan dapat cepat bertumbuh. Tinggi rendahnya angka SGR sangat dipengaruhi oleh empat faktor yaitu:

1. Marjin laba. Tingginya tingkat marjin laba akan meningkatkan kemampuan perusahaan memperoleh dana internal sehingga meningkatkan angka pertumbuhan berkesinambungan.
2. Kebijakan dividen. Penurunan angka persentase laba bersih yang didistribusikan sebagai dividen akan meningkatkan angka laba yang ditahan (*retention ratio*), sehingga meningkatkan dana internal (*equity*) dan sekaligus meningkatkan angka pertumbuhan berkesinambungan.
3. Kebijakan keuangan. Peningkatan rasio hutang terhadap modal (*debt to equityratio*) akan meningkatkan *leverage* keuangan perusahaan dan apabila tambahan hutang tersedia maka akan meningkatkan angka pertumbuhan berkesinambungan.
4. Perputaran aktiva. Peningkatan perputaran aktiva akan meningkatkan angka penjualan yang diperoleh dari peningkatan aktiva. Peningkatan perputaran aktiva menunjukkan meningkatnya efektivitas penggunaan aktiva dalam mencapai penjualan sehingga akan menurunkan penambahan aktiva yang akhirnya akan meningkatkan angka pertumbuhan berkesinambungan (Ross and Jordan 1998).

#### 2.2.5.Keputusan Investasi dan Pembiayaan

Setiap perusahaan dalam menjalankan bisnis akan membutuhkan aktiva nyata (*real assets*) meliputi aktiva yang berwujud dan aktiva yang tidak berwujud, dimana aktiva nyata tersebut digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ada 2 (dua) pertanyaan yang harus dijawab oleh manajemen keuangan sehubungan dengan investasi pada aktiva nyata. Pertama adalah berapa jumlah uang tunai yang

dibutuhkan untuk kebutuhan investasi aktiva nyata. Kedua, jenis perusahaan investasi aktiva. Hal ini merupakan bagian dari pekerjaan manajemen keuangan yang disebut keputusan investasi (*investing decision*). Keputusan investasi adalah keputusan untuk menentukan jenis aktiva nyata yang mana yang seharusnya diambil alih oleh perusahaan (Marcus et al. 1999).

Tolok ukur keberhasilan manajemen keuangan dalam mengambil keputusan investasi adalah kemampuan memilih aktiva nyata yang diambil alih yang mampu membawa tingkat pengembalian yang tinggi bagi perusahaan. Setelah manajemen keuangan mampu memilih dan menentukan jumlah dana yang dibutuhkan dalam melakukan investasi pada aktiva nyata, maka tanggung jawab manajemen keuangan adalah mencari sumber dana untuk membiayai investasi pada aktiva nyata atau disebut keputusan pembiayaan (*financing decisions*). Kebijakan pembiayaan perusahaan membutuhkan manajer untuk mengidentifikasi cara mendanai investasi baru, yang alternatifnya adalah menggunakan laba ditahan (*retained earning*), pinjaman melalui instrumen hutang, dan menerbitkan saham baru (Prasad and Maurinde 2001). Dua alternatif tersebut dapat dipenuhi oleh perusahaan dengan menerbitkan surat berharga (*financial assets*). Surat berharga yang diterbitkan perusahaan merupakan klaim atas laba yang dihasilkan aktiva nyata baik berupa bunga maupun dividen. Surat berharga ini diperdagangkan di *financial market*. Dalam keputusan pembiayaan, manajemen keuangan menempatkan diri antara perusahaan

yang memiliki aktiva nyata dengan *financial market* untuk mencari dana dalam rangka membiayai aktiva nyata (Marcus and Markus 1999). Dalam melakukan keputusan pendanaan, perusahaan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana ekonomis guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya (Idrus et al.2001). Tolok ukur keberhasilan manajemen keuangan dalam mengambil keputusan pembiayaan adalah kemampuan memilih alternatif pembiayaan yang membutuhkan biaya penggunaan dana yang rendah.

Dalam upaya mengoptimalkan keputusan investasi dan keputusan pembiayaan, manajemen keuangan menggunakan alat keuangan yang disebut analisa penganggaran modal (*capital budgeting*). Alat analisa penganggaran modal memiliki berbagai metode, antara lain adalah Nilai Tunai Bersih (*Net Present Value*), Tingkat Pengembalian Internal (*Internal Rate of Return*), *Pay Back Period* dan sebagainya. Dengan alat analisis ini manajer keuangan akan dapat menentukan apakah tingkat pengembalian atas investasi pada aktiva nyata mampu menutupi biaya penggunaan dana. Apabila hasil analisis penganggaran modal menunjukkan bahwa tingkat pengembalian atas aktiva nyata mampu menutupi biaya penggunaan dana maka manajemen akan merealisasikan keputusan investasi dan keputusan pembiayaan.

Untuk dapat merealisasikan keputusan investasi maupun keputusan pembiayaan, manajemen keuangan harus mampu memilih jenis aktiva nyata yang mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi dan sebaliknya menghasilkan biayapenggunaan dana yang rendah atas pilihan berbagai alternatif pembiayaan.

#### 2.2.6. Pelaporan keuangan

Tujuan utama pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan kemampuan dalam memperoleh arus kas baik dalam jumlah, waktu, dan ketidakpastian untuk mendapatkannya. Disamping itu, pelaporan keuangan dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktiva yang dimiliki perusahaan, kewajiban, modal pemilik dan dampak dari transaksi maupun kejadian yang mengubah aktiva, kewajiban maupun modal pemilik. Walaupun laporan keuangan belum dapat memenuhi semua tujuan dari sistem pelaporan keuangan, laporan keuangan yang dihasilkan manajemen perusahaan seharusnya sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan (White et al. 1994). Setiap transaksi perusahaan selalu bermula dari strategi dan keputusan manajemen dalam bidang pemasaran, produksi, keuangan dan sumber daya manusia. Transaksi tersebut akan diproses dalam sistem informasi akuntansi untuk menjadi laporan keuangan dan pertanggungjawaban manajemen. Berdasarkan laporan keuangan maka manajemen perusahaan dan pihak luar (investor dan kreditor) akan melihat sampai sejauh mana efektivitas strategi dan keputusan yang diambil manajemen dalam menjalankan organisasi bisnis baik bidang pemasaran, produksi, sumberdaya manusia, dan keuangan.

Dalam setiap keputusan bisnis yang diambil oleh manajemen perusahaan, bagi investor dan kreditor yang diperlukan adalah sampai sejauh mana dana yang

ditanamkan dalam perusahaan yang diwujudkan oleh manajemen perusahaan dalam aktiva perusahaan mampu menciptakan tingkat pengembalian yang sesuai dengan keinginan investor maupun kreditor. Sehingga investor maupun kreditor dapat mengambil keputusan menambah investasi maupun keputusan melakukan divestasi. Dengan kata lain, laporan keuangan mencerminkan semua transaksi usaha sepanjang waktu yang menghasilkan peningkatan maupun penurunan bersih nilai ekonomi bagi penyandang dana (Helfert; 1994). Sedangkan bagi manajemen perusahaan, informasi dalam laporan keuangan dapat dijadikan evaluasi atas strategi dan keputusan investasi juga atas strategi dan keputusan pembiayaan yang dilakukan. Agar dapat memberikan makna bagi pengguna laporan, terutama investor dan kreditor maka dibutuhkan analisis rasio keuangan. Manajer keuangan menggunakan analisis rasio keuangan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan. Rasio merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan 1) satu rasio dengan rasio lain yang berkaitan, 2) kinerja perusahaan dengan tujuan manajemen, 3) kinerja masa lalu dan sekarang, 4) kinerja perusahaan dengan perusahaan sejenis. Rasio keuangan dapat juga digunakan untuk mendeteksi kesehatan perusahaan, seperti seorang dokter mendeteksi kesehatan manusia (Galagher and Andrew; 2003).

Laporan keuangan merupakan data mentah untuk diolah melalui alat analisis rasio keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi investor maupun kreditor dalam mengukur resiko (*risk*) maupun tingkat pengembalian (*return*) dari keputusan investasi maupun pembiayaan (White et al. 1994). Angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan meliputi laporan perhitungan laba

rugi, neraca, dan laporan arus kas merupakan input yang dibutuhkan dalam analisis rasio keuangan, sehingga asumsi dan metode akuntansi yang digunakan akan mempengaruhi angka yang dihasilkan dalam laporan keuangan. Berkaitan dengan itu, pemahaman tentang asumsi dan metode yang dipakai dalam mencatat transaksi dan melaporkan angka dalam laporan keuangan sangat diperlukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selain asumsi dan metode akuntansi

dalam melakukan analisa rasio keuangan yaitu:

1. Asumsi ekonomi. Asumsi ekonomi menyatakan bahwa analisis rasio dirancang untuk menghilangkan perbedaan antar perusahaan dan antar waktu sehingga memberikan makna perbandingan antar perusahaan maupun antar waktu

2) *Benchmarks*. Analisis rasio keuangan suatu perusahaan akan sangat berarti apabila dibandingkan dengan rata-rata industri yang sama, sehingga angka rasio keuangan rata-rata industri merupakan *benchmark* bagi perusahaan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Salah satu cara terbaik untuk memastikan kelas kinerja terbaik adalah mengetahui bagaimana *top competitor* perusahaan berkembang, membandingkan dengan perusahaan lain dan menjadi *market leader*. Perbandingan dengan industri sejenis minimal membutuhkan dua dimensi, yaitu: investasi dan nilai yang dihasilkan. Ada tiga alasan mengapa kolaborasi *benchmarking* sangat penting, yaitu: membantu *stakeholders* mengetahui rencana investasi berdasarkan indikator kinerja yang jelas, membantu eksekutif membuat *budget proposal* dengan data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang beralasan, dan menciptakan kesadaran

kompetisi dan keandalan yang diperlukan *stakeholders* untuk menjadi pemimpin dan memberi kerangka kerja untuk mengukur kesuksesan (Pisello 2003).

3) Ketepatan waktu dan *window dressing*. Data yang digunakan dalam menghitung rasio merupakan data pada waktu tertentu dimana laporan keuangan diterbitkan, sehingga rasio keuangan yang dihasilkan belum tentu dapat mengukur kinerja aktual perusahaan sepanjang tahun tertentu atau siklus operasi tertentu. Misalnya, manajemen membuat transaksi pada akhir tahun untuk memanipulasi angka laporan keuangan (*window dressing*) yang juga memanipulasi angka dalam rasio keuangan.

4) Angka negatif. Analisis rasio keuangan tidak dapat memberi makna pada angka laporan keuangan yang negatif (White et al. 1994). Walaupun laporan keuangan memiliki kelemahan baik dari sisi asumsi, metode, dan hal-hal yang lain tetapi sampai saat ini masih digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan.

#### 2.2.7. Analisis utilisasi aktiva

Analisis utilisasi aktiva menghubungkan antara laba dengan aktiva. Selain itu, analisis ini juga mengukur hubungan antara input perusahaan (aktiva) dengan output perusahaan (laba). *Return on Investment* (ROI) digunakan untuk mengukur utilisasi aktiva (Bergevin 2002). Ada dua level dalam menghitung besaran ROI:

1. Mengukur sampai sejauh mana dana yang digunakan perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva mampu menghasilkan laba bersih. Secara matematis menghitung ROI adalah laba bersih dibagi investasi bersih atas aktiva dikali 100%.

2. Mengukur *profit margin* dan mengukur perputaran aktiva. Profit margin digunakan untuk mengukur berapa komposisi laba dari setiap penjualan yang dilakukan (*profitability*). *Profit margin* dinyatakan secara matematis adalah laba bersih dibagi penjualan bersih (*assets utilization*). Perputaran aktiva adalah mengukur sampai sejauh mana efektivitas penggunaan aktiva dalam mendukung penjualan. Perputaran aktiva dinyatakan secara matematis adalah penjualan bersih dibagi investasi bersih atas aktiva.

Dengan menggunakan level dua dalam mengukur ROI, maka manajemen dapat melakukan improvisasi untuk dapat meningkatkan ROI. Gambar 1 berikut ini adalah aksi manajemen dalam meningkatkan ROI (Wright 1996). Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts* ( SFAC ) Nomor 1, salah satu tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna bagi investor, kreditur dan pihak-pihak lainnya untuk memperkirakan jumlah, waktu dan ketidakpastian dari kas masuk (sesudah dikurangi arus kas keluar) dimasa yang akan

datang dari suatu perusahaan (Baridwan, 1997 : 3). Investor membutuhkan informasi keuangan untuk menilai kinerja perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangannya seperti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan perubahan posisi keuangan yang akan menentukan berbagai keputusan yang akan diambil sesuai dengan kepentingannya. Hubungannya dengan itu, “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi” (IAI, 1999 : 4). Secara umum laporan keuangan menggambarkan pengaruh keuangan dari kegiatan dimasa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non keuangan.

Informasi laba dalam hal ini adalah laba sesudah pajak (EAT) sebagai bagian dari informasi akuntansi yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan, pada umumnya digunakan sebagai suatu alat untuk mengukur kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu, dimana semakin besar laba maka kinerja perusahaan akan dinilai semakin baik sehingga akan mempengaruhi keputusan investasi yang dilakukan investor. Keputusan investasi akan dilakukan investor apabila mereka menganggap bahwa prospek dari suatu investasi akan menguntungkan, karena masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu investor akan menganalisis prospek dari perusahaan tersebut melalui kinerjanya yang tercermin melalui laba yang tercantum dalam laporan keuangan yang dipublikasikannya.

Dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang berupa angka-angka dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan

Bursa Efek Surabaya, kemudian disusun dalam table, dilakukan perhitungan-perhitungan dan hasilnya akan dianalisa. Adapun analisa yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan menggunakan analisa sebagai berikut :

#### 2.2.7.1.Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban financial pada saat ditagih. Adapun pengukuran likuiditas dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Curren Ratio} : \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100 \%$$

#### 2.2.7.2..Leverage

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan tersebut dibiayai oleh hutang jangka panjang.

$$\text{Total Debt to asset ratio} : \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \%$$

#### 2.2.7.3.Profitabilitas

ROI (*Return on Investmeni*) ROI adalah alat ukur yang sangat umum digunakan untuk mengukur kineija sebuah pusat investasi. Rumus untuk menghitung ROI adalah laba bersih bagi dengan jumlah aktiva selama satu periode. ROI lebih baik daripada *earnings* karena laba dari kegiatan operasi perusahaan saja yang dipertimbangkan. Secara matematis, ROI dapat dinyatakan sebagai berikut: (Munawir 1998: 105)

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba bersih sesudah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

#### 2.2.7.4. *Return on Equity/ROE* (pengembalian atas kekayaan bersih)

*Return on Equity/ROE* (pengembalian atas kekayaan bersih) adalah Hubungan laba tahunan setelah pajak terhadap ekuitas pemegang saham yang tercatat. Rasio ini digunakan sebagai ukuran efektivitas dana pemegang saham yang telah diinvestasikan.

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran dividen.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

2. Semakin besar rasio ini maka makin besar kenaikan laba bersih perusahaan yang bersangkutan, selanjutnya akan menaikkan harga saham perusahaan dan semakin besar pula dividen yang diterima investor

Dari keempat analisa ini, yaitu : analisa *Likuiditas (current ratio)*, analisa *Leverage (Total Debt to asset ratio)*, *Profit (Return on Investmen)*, dan *Return on Equity* peneliti akan menggunakan analisa *Return on Equity* ( Pengembalian atas kekayaan bersih)

## **2.3. Good Corporate Governance**

### **2.3.1. Definisi Good Corporate Governance**

Berikut adalah beberapa definisi tentang *Good Corporate Governance* :

1. Utama dan Afriani (2005) dalam Radita (2006), menyatakan bahwa secara umum Good Corporate Governance adalah “system dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*Stakeholder*) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat lain.”
2. Belgioan *Commision on Coroporate Governance* mendefinisikan *Corporate Governance* secara luas sebagai “*Corporate Governance to the set of rules applicable to the direction an control of a company.*”
3. Menurut Forum for corporate Governance Indonesia (FCGI), “Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

4. Mardjana (2000) dalam Radita (2006), dengan mengutip berbagai sumber mendefinisikan corporate governance sebagai “proses dan struktur pengelolaan bisnis dan urusan-urusan perusahaan lainnya dalam rangka meningkatkan kemakmuran korporasi dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham yang optimal dalam jangka panjang dan dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.”

Esensi *Good corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka peraturan yang berlaku. Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor, serta komite audit independent. *Good Corporate Governance* memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *check and balance* di perusahaan.

*Good Corporate Governance* diperlukan dalam rangka :

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajiban.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab social perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Pengamat bisnis Singapura, Lee Lam Thyee, menyatakan :

*Good corporate governance is now the key word for organization as they are expected to set high standards in meeting the demands of their shareholders. Directors are therefore subjected to higher standards which cover not the technical efficiency of operations, but also the implementation of an efficient management system through the use of "best practices" developed from high ethical values. (Role of Directors Vital to Good Governance", the new Strait Times, 30 August, 1999).*

Manajemen adalah mengatur hal-hal teknis bagaimana agar perusahaan mencetak laba, dan tetap berkembang karena mampu terus menerus mencetak

laba. Dalam manajemen tidak banyak dikedepankan perihal nilai kepatutan-kemanusiaan. GCG menyentuh sisi yang tidak diraih oleh manajemen.

*Good corporate governance* selanjutnya disingkat GCG secara definitive merupakan system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*Value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *Stakeholder* (YPPMI & SC, 2002). Atau secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* ini, yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley et al., 1996). Chtourou et al. (2001) juga mencatat bahwa prinsip *good corporate governance* yang diterapkan dengan konsisten dapat menjadi penghambat (*constrain*) aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Rekayasa kinerja yang terkenal dengan istilah *earning management* ini sejalan dengan teori agensi (*agency theory*) yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (*principles*) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada

professional (*agents*) yang lebih mengerti dan memahami cara untuk menjalankan usaha (YPPMI & SC,2002). Namun pemisahan ini mempunyai sisi negative, keleluasaan manajemen untuk memaksimalkan laba akan mengarah ke proses memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri dengan biaya yang harus ditanggung pemilik perusahaan.Kondisi ini terjadi karena asimetri informasi (*information asymmetry*) antara manajemen dan pihak lain yang tidak mempunyai sumber dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk memonitor tindakan manajemen (Richardson, 1998; DuCharme et al., 2000). Rekayasa ini merupakan upaya manajemen untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan pemegang saham yang ingin mengetahui kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkannya (Healy & Wahlen, 1998,;DuCharme et al, 2000). Secara prinsipil, manipulasi ini tidak sejalan dengan semangat *good corporate governance*.

Secara empiris, terbukti bahwa penerapan prinsip *good corporate governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menjadi *constrain* bagi aktivitas rekayasa kinerja yang dilakukan oleh manajemen. Secara teoritis, rekayasa yang dikenal dengan istilah *earnings management* ini bertujuan untuk menyesatkan pemakai laporan keuangan yang ingin mengetahui kinerja perusahaan dan untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi. Rekayasa keuangan ini tidak sejalan dengan semangat *good corporate governance* yang menekankan pentingnya keterbukaan,

akuntabilitas, dan transparansi informasi yang akurat dan menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Penerapan prinsip *good corporate governance* di perusahaan sebenarnya diharapkan juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan yang tercermin dari menurunnya tingkat rekayasa yang dilakukan manajemen.

Rekayasa kinerja sebenarnya merupakan fenomena yang logis karena kesuperioran manajemen dalam menguasai informasi seputar perusahaan dibandingkan pihak lain. Namun, dalam kerangka, *economy recovery*, rekayasa keuangan ini tidak sejalan dengan semangat *good corporate governance* yang menekankan pentingnya akurasi dalam melaporkan informasi mengenai perusahaan. Keakuratan ini penting agar informasi yang disampaikan dapat menggambarkan nilai fundamental perusahaan yang sesungguhnya, sehingga pemakai laporan keuangan dapat membuat keputusan yang lebih tepat.

Asimetri informasi (*informasi asymmetry*) antara manajemen dan pemakai laporan keuangan memberi kesempatan dan mendorong manajemen bersikap oportunistik dengan memperbaiki profil laba akuntansi (Richardson, 1998; Chambers, 1999). Sikap oportunistik ini tidak sejalan dengan semangat *good corporate governance*, karena rekayasa keuangan mengakibatkan informasi yang disampaikan menjadi tidak akurat dan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Sikap oportunistik ini dinilai sebagai sikap curang (*fraud*) manajemen yang diimplikasikan dalam laporan keuangannya pada saat menghadapi *intertemporal choice* (Beneish, 2001). Sikap curang tersebut didefinisikan sebagai

satu atau lebih tindakan yang disengaja didesain untuk menipu orang lain yang menyebabkan kehilangan kekayaan (*financial*). Keberhasilan dari sikap ini dinilai ketika manajemen berhasil menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam menilai perusahaan.

Walaupun “logis” dilakukan manajemen karena superioran dalam menguasai informasi, rekayasa ini tidak sejalan dengan semangat *Good Corporate Governance* yang menekankan pentingnya hak pemakai laporan keuangan untuk memperoleh informasi yang akurat dan kewajiban perusahaan untuk memberikan informasi yang akurat (YPPMI & SCm2002). Chtorou et al. (2001) dalam penelitiannya yang menguji apakah praktik *corporate governance* mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas informasi keuangan yang dipublikasikan menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *good corporate governance* akan menjadi kendala (*konstrain*) aktivitas *earnings management*. Penelitian tersebut menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi rekayasa yang dilakukan manajemen. Beasley et al.(1996) dan Abbot et al.(2002) yang menduga ada hubungan antara penerapan *corporate governance* dengan berkurangnya kecurangan pada pelaporan keuangan (*financial reporting*) membuktikan meningkatnya kualitas laporan keuangan karena penerapan prinsip tersebut secara konsisten.

Hasil-hasil penelitian Beasley (1996), McMullwen dan Randghun ( 1996), Westphal & Zajac (1997), Abbot et al.(2000). Carcello & Neal (2000), Chotourou et al.(2001) telah berhasil membuktikan bahwa penerapan *good corporate*

*governance* mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Secara umum dapat dinyatakan bahwa penerapan prinsip *good corporate governace* secara signifikan akan mengurangi upaya rekayasa keuangan yang dilakukan manajemen sehingga lebih lanjut dapat meningkatkan performa *earnings management* suatu perusahaan.

### **2.3.2. Pengertian GCG**

Secara umum istilah *governance* lebih ditujukan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, dalam arti lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para stakeholder. Good Corporate Governance memang menyangkut orang (moralitas), etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik.

Konsep *good corporate governance* baru populer di Asia, konsep ini relative berkembang sejak tahun 1990an. Konsep *good corporate governance* baru dikenal di Inggris pada tahun 1992, Australia mengenalnya tahun 1996, negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok negara-negara maju di Eropa Barat dan Corporate Governance atau “Panduan Corporate Governance” disahkan pada tahun 1999, *Singapore Rules* baru diresmikan pada tahun 1998 dan disusul *Malaysian Code* pada tahun 1999 dan Hong Kong Rules pada tahun 1998, *Indonesian Rules Code* baru diformalkan pada tahun 2001 melalui Keputusan Menteri BUMN.

Pada tahun 2001, sebuah kelompok studi *Corporate Governance* melakukan studi pemeringkatan nilai-nilai *corporate governance* di beberapa negara Asia. Indonesia menduduki peringkat 10 dari 11 negara lokasi studi. Studi ini mengukur *Index Corporate Governance* yang merupakan kumpulan dari factor-faktor *discipline, transprancy, independence, accountability, responsibility, fariness, dan social awareness*.

Data berikut ini menunjukkan kondisi GCG per 2001.

<b>Negara</b>	<b>CG</b>	<b>D</b>	<b>T</b>	<b>I</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>F</b>	<b>S</b>
Singapore	64.5	55.6	66.5	80.6	45.3	70.2	75.6	54.3
Hong Kong	62.9	51.2	65.8	55.5	54.6	71.1	77.2	65.8
Malaysia	56.6	48.5	63.4	66.6	37.5	51.8	70.	59.6
India	55.6	56.8	38.4	50.9	53.8	42.9	73.3	82.3
Thailand	55.1	36.1	64.5	43.2	63.1	46.7	70.3	65.0
Taiwan	54.6	48.2	58.1	77.8	41.2	38.7	50.4	74.8
China	49.1	40.9	55.2	42.6	33.5	49.3	68.9	55.3
Korea	47.1	38.0	55.0	38.1	53.6	38.2	45.1	68.8
Philipines	43.9	40.6	43.5	45.7	33.8	35.8	40.8	78.3
Indonesia	37.3	35.8	57.2	22.2	20.8	34.3	53.4	37.0
Pakistan	33.9	39.4	32.0	33.8	29.3	27.8	23.2	61.1

Keterangan :

CG:CD Score D: Discipline T:Transparency I: Independence A:Accountability  
R:Responsibility R: Fairness S: Social Awareness

Sumber : Carmody, Concept of Good Corporate Governance, 2002.

Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi GCG Indonesia tidak banyak beranjak dari kondisi sebelumnya, tetap pada urutan bawah. Tentu saja, ini adalah tantangan korporasi-korporasi di Indonesia, mengingat sejak krisis kita sudah mempunyai komite nasional *Good Corporate Governance* yang mengutamakan GCG di Indonesia.

Kondisi GCG di Asia pada tahun 2000an juga masih memprihatinkan. Pada tahun 2000, Asian Development Bank yang bermaskas di Manila menyusun laporan studi tentang implementasi *corporate governance* di lima negara Asia Timur yaitu Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, dan Malaysia. Pemahaman tentang hasil studi tersebut memberikan pengertian tentang apa dan bagaimana konsep *corporate governance* itu harus diterapkan. Dalam studi yang berjudul *Corporate Governance and Finance in East Asia: A Study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines*, ADB menyatakan bahwa kelemahan utama *corporate governance* dalam lima negara lokasi studi adalah sebagai berikut :

Pertama, para dewan direktur dalam banyak kasus telah gagal berfungsi sebagai komite pengawas atas nama para pemegang saham. Secara khusus, kepentingan pemegang saham minoritas tidak terlindungi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh tingginya dominasi pemegang saham pengontrol yang berbasis keluarga dan kurang efektifnya mekanisme *checks and balances* yang umumnya

digambarkan dengan adanya perwakilan direktur independent dan sub-komite independent untuk melakukan audit, mengajukan nominasi, dan mengusulkan renumerasi.

Kedua, keterlibatan pemegang saham minoritas dalam pembuatan keputusan perusahaan cenderung pasif, dan peran mereka dalam pengawasan dan pengendalian cenderung lemah. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan serta kurang memadainya insentif yang mereka terima.

Ketiga, pengawasan dan pendisiplinan oleh kreditor masih lemah dan kurang, karena adanya hubungan dekat antara kreditor dan peminjam, loggarnya supervise pemerintah dan regulasi sektor keuangan, dan adanya masalah *governance* yang dihadapi oleh kreditor itu sendiri.

Keempat, rendahnya standar transparansi dan pengungkapan (*disclosure*) dari suatu masalah menyulitkan atau bahkan menindakmungkinan pengawasan dan pengendalian oleh pemegang saham dan kreditor minoritas.

Kelima, perlindungan hukum bagi pemegang saham dan kreditor minoritas masih kurang, umumnya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum sehingga disiplin eksternal menjadi lemah dan praktik-praktik tidak baik oleh pemegang saham mayoritas tidak terdeteksi.

Keenam, disiplin eksternal lebih lanjut telah tergerus akibat lemahnya persaingan persaingan dalam pemasaran produk, kurangnya kendali korporat, dan masih tertingginya pasar modal.

ADB menekankan pentingnya langkah-langkah reformasi *governance* pada sejumlah perusahaan di lima negara tersebut guna peningkatan *system corporate governance* di perusahaan-perusahaan di lima negara tersebut. Reformasi ini dapat digolongkan menjadi empat bidang: (1) struktur kepemilikan korporat; (2) perlindungan kendali internal dan pemegang saham korporat; (3) pengawasan dan disiplin eksternal; dan (4) pengembangan pasar modal dan pembiayaan korporat (ADB telah memperkenalkan empat langkah reformasi *system corporate governance* tersebut di negara-negara yang bersangkutan pada tahun 2000).

Corporate *governance* yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia. Konglomerat yang tidak baik dalam menjalankan usaha dan pemerintah yang korup adalah contohnya. Menyehatkan ekonomi nasional juga berarti menerapkan prinsip Good Corporate Governance ini dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Pada tahun 1999, kita melihat negara-negara di Asia Timur yang sama-sama terkena krisis mulai mengalami pemulihan kecuali Indonesia. Konsultan manajemen McKinsey & Co, melalui penelitian pada tahun yang sama, menemukan bahwa sebagian besar nilai pasar perusahaan-perusahaan Indonesia yang tercatat di pasar modal (sebelum krisis) ternyata *overlued*. Ditemukan bahwa sekitar 90% nilai pasar perusahaan public ditentukan oleh *growth expection* (harapan pertumbuhan dan 10% sisanya baru ditentukan oleh *current earning stream* ( arus pendapatan riil). Sebagai pembanding, nilai dari perusahaan public yang sehat di negara maju ditentukan dengan komposisi 30% dari *growth*

*expectation* dan 70% dari *current earning stream*, yang merupakan kinerja sebenarnya dari korporasi. Jadi sebenarnya terdapat “ketidakjujuran” dalam permainan dipasar modal yang kemungkinan dilakukan atau diatur oleh pihak yang sangat diuntungkan oleh kondisi tersebut.

Victoria Kapitalindo International, perusahaan pengamat pasar modal, menemukan bahwa sebelum krisis sekitar 40% dari 350 emiten yang mencatat sahamnya di BEJ terbukti menyalahgunakan dana hasil IPO sehingga penggunaannya tidak sesuai prospectus. PT. Barito Pacific Timber, misalnya, yang melakukan IPO pada tahun 1992-1993 memarkir dananya di deposito, dan bukannya diinvestasikan seperti janji waktu IPO dan tidak diberikan pertanggungjawaban kepada public sehingga mereka ditegur oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Sementara itu, 60-70% dari 350 perusahaan public di BEJ gagal mencapai *return* seperti yang ditargetkan dalam IPO. Dua penyebabnya adalah *overstead* dan hal-hal di luar kendali manajemen, seperti krisis ekonomi (Bisnis Indonesia, 29 Mei 2000). “*Overstead*” artinya juga memberikan pernyataan yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, dan dalam konteks ini berarti bias dalam governansi-korporat.

Booz-Allen menemukan terjadi praktik *mark-up* dalam pencarian pinjaman. Data yang dimilikinya menunjukkan terdapat *mark-up* sampai 10 kali *operating cash flow* riil. Dalam praktik, kondisi ini akan menghancurkan struktur capital di dalam perusahaan. Kasus ini terjadi baik di BUMN maupun swasta.

Secara umum, rendahnya kondisi governansi korporat di Indonesia dikemukakan oleh ekonom asal MIT, Profesor Paul Krugman, bahwa kunci pemulihan ekonomi Indonesia adalah pelaksanaan *corporate governance* untuk mencegah *moral hazard*, praktik *mark-up*, penilaian pasar yang bias, dan pengelolaan korporat yang tidak bertanggung jawab kepada *stakeholders* (Seminar Indonesia Economic Forecast, September 1999).

Rendahnya kualitas *corporate governance* mempengaruhi daya saing perusahaan-perusahaan pada suatu negara. Secara agregat, rendahnya daya saing perusahaan mempengaruhi rendahnya daya saing negara yang bersangkutan. Oleh karena perusahaan-perusahaan di negara tersebut dinilai kurang memberikan nilai tambah kepada pemilik atau investor maka terjadi kecenderungan menurunnya intensi dari pelaku usaha atau investor untuk masuk ke negara tersebut, baik untuk membangun bisnis atau ikut serta dalam bisnis yang ada.

Padahal, makna GCG bagi korporasi sangat signifikan. McKinsey & Co melakukan survey pada tahun 1996, dan menemukan bahwa pemegang saham bersedia membayar premium hingga 11% untuk saham perusahaan yang dikelola dengan prinsip *corporate governance*.

Survei dilakukan oleh Majalah *Business Week* pada tahun 1997 mendapati fakta bahwa 25 perusahaan terbaik dalam penerapan *corporate governance* menghasilkan tingkat pengembalian (ROI) rata-rata sebesar 27,6% tiap tahun, dan 25 perusahaan terburuk dalam penerapan *corporate governance* menghasilkan tingkat kembalian rata-rata sebesar hanya 5,9% pertahun ( Corporate Governance

dan Etika Korporasi, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pembina BUMN, Jakarta, 1999, h.28-29).

### **2.3.3. Dinamika Nilai *Corporate Governance* dalam Konteks Kultural**

Sir Adrian Cadbury (1999) mendefinisikan *Corporate governance* sebagai berikut, “*Corporat Governance is...holding the balance between economic and social goals...The governance framework is there to encourage the efficient use of resources and equally to require accountability for the stewardship of those resources... the incentive to corporations is to achieve their corporate aims and to attract investment. The incentive for states is to strengthen their economics...* Hubungan antara social dan ekonomi ini menimbulkan adanya dinamika pembentukan nilai *corporate governance*. Hal ini disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa setiap perubahan pasti menimbulkan eksese tertentu. Sesuai pula dengan hukum fisika yang dikenal dengan hukum kekekalan massa, bahwa suatu perubahan bukanlah perubahan yang sesungguhnya, namun hanyalah berubah wujud dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Proses perubahan bentuk itu membutuhkan energi. Pada saat energi terserap dalam proses perubahan itu, maka suatu dinamika terjadi.

Yusuf H. Shirazi menyebut dinamika pembentukan nilai *corporate governance* suatu peningkatan progresif dari penciptaan nilai melalui *corporate culture* yang dibangun dari masa ke masa yaitu dari Zaman Batu ke Zaman Besi dan kemudian fase Pertanian, Industri, Teknologi menuju ke zaman yang disebut Zaman Pengetahuan.

Dalam konteks suatu organisasi, para *stakeholder* yang memberikan sumbangannya pada dinamika nilai dari suatu *corporate culture* yang kuat terdiri atas

pelanggan, karyawan pemegang saham, *supplier*, kreditor, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Untuk memperkuat dan mempertahankan praktik-praktik *corporate* yang baik, pemegang saham secara langsung dan melalui dewan direksi memberi arahan dan mendukung manajemen untuk melaksanakan praktik-praktik tersebut. Hal ini diperkuat oleh para *regulator* dan *auditor* yang memiliki peran penting bagi penegakan hukum. Ketentuan-ketentuan tersebut eksplisit dan implisit dijelaskan secara singkat.

Suatu *Corporate culture* yang baik bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi sumber dayanya, sehingga ide dan tujuan yang tercipta dalam suatu organisasi membutuhkan kepemimpinan yang kuat guna membawa mereka. Suatu strategi yang dipikirkan secara matang perlu dilaksanakan melalui sebuah struktur yang dilengkapi dengan budaya yang mampu meresap ke dalam seluruh organisasi itu. Dalam lingkungan saat ini, suatu organisasi harus selaras dengan pengetahuan mutakhir dan dengan perubahan-perubahan yang perlu diantisipasi. Suatu organisasi harus bergantung pada inovasi dimana pun jika dimungkinkan dan upaya-upaya agar tetap berada di depan pesaingnya. Namun demikian, semua ini hanya dapat terjadi jika mereka menerapkan proses system terbaru dan paling efisien serta melindungi hak atas kekayaan intelektual mereka.

Di luar asset *intangible* ini terdapat asset *tangible* perusahaan yang terdiri atas basis pelanggan mereka dan saluran-saluran yang mereka gunakan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Saluran-saluran ini dapat berupa rekanan yang perlu dipengaruhi supaya mereka turut menjalankan *best corporate practices*. Elemen lain dalam suatu organisasi adalah karyawan perusahaan dan *supplier* atau *partner* bisnis. Tingkah laku dan perbuatan mereka sangat penting mengingat keduanya

merupakan gambaran budaya organisasi tersebut dan membantu dalam penciptaan standar yang harus diikuti.

#### **2.3.4. Ada empat model pengendalian perusahaan :**

##### 1. Simple financial model.

Ada konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. Karena tidak memiliki saham, dikhawatirkan manajer akan banyak merugikan pemilik saham. Maka diperlukan kontrak insentif (misalnya hak pemilikan, bonus, dll), atau aturan-aturan yang melindungi kepentingan pemilik.

##### 2. Stewardship model.

Berbeda dengan model pertama, manajer dianggap steward, sehingga tidak terlalu perlu dikontrol. Ini bisa terjadi pada perusahaan keluarga, dimana direksi dikendalikan ketat oleh pemegang saham, sehingga diperlukan direktur yang independen.

##### 3. Stakeholder model.

Perusahaan merupakan satu sistem dari stakeholder dalam suatu sistem masyarakat yang lebih luas. Suara stakeholder diakomodasi dalam struktur dewan direksi. Karyawan diusahakan bekerja seumur hidup.

##### 4. Political model.

Pemerintah memiliki pengaruh besar, misalnya dalam mengatur jumlah maksimum kepemilikan saham, dll.

Pada prakteknya, GCG dilaksanakan dengan gabungan dari empat hal diatas.

Tujuannya adalah bagaimana mengarahkan dan mengontrol perusahaan melalui distribusi hak/tanggungjawab semua pihak dalam perusahaan.

### **2.3.5.Prinsip-prinsip GCG yang baik**

#### **- Transparency**

Pengungkapan informasi merupakan hal penting, sehingga semua pihak berkepentingan tahu pasti apa yang telah dan bisa terjadi. Laporan tahunan perusahaan harus memuat berbagai informasi yang diperlukan, demikian pula perusahaan go-public. Persyaratan untuk ini antara lain disusun oleh Komite Nasional Bagi Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (KNPPB).

#### **- Fairness**

GC yang baik mensyaratkan adanya perlindungan untuk hak minoritas. Perlakuan yang sama dan adil pada semua pemegang saham, melarang kecurangan insider trading, dll. KNPPB mensyaratkan minimal 20% direksi berasal dari luar yang tidak ada hubungan dengan pemegang saham dan direksi.

#### **- Accountability**

Ada pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris, dan direksi. Ada pertanggung-jawaban dari komisaris dan direksi, serta ada perlindungan untuk karir karyawan. Perlu ditetapkan berapa kali rapat dalam kurun waktu tertentu, serta berbagai sistem pengawasan yang lain.

*- Responsibility*

Perlu dipastikan adanya kepatuhan perusahaan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Misalnya dalam PT terbuka perlu adanya sekretaris perusahaan.

Ada lagi yang menambahkan asas disiplin, independency, dan social-awareness, check and balance, dan social involvement.

*- Etika Kerja*

GC lebih banyak mengatur komisaris dan direksi, namun prinsip-prinsip GC harus diangkat menjadi etika kerja perusahaan. Diperlukan penerapan prinsip-prinsip CG dalam perilaku kerja karyawan perusahaan. Sebagai contoh, inilah beberapa kode etik yang disusun oleh sebuah komite di luar negeri ;

Kewajiban karyawan pada perusahaan :

- Menghindari gangguan yang tidak masuk akal pada proses produksi.
- Menggunakan kemampuan dan mengembangkan potensi sebanyak mungkin, khususnya bila baru saja mendapat pelatihan.
- Tidak membocorkan rahasia perusahaan.
- Jujur dan melaporkan setiap tindakan yang membahayakan.
- Menghormati kontrak kerja.
- Tidak melakukan hal-hal yang merugikan pemegang saham.

Kewajiban karyawan pada manajer :

- Mendukung dan membantu untuk memenuhi kewajiban etis dan komersial.

Kewajiban karyawan pada karyawan lain:

- Tidak melakukan tindakan yang salah pada karyawan lain,
- Tidak mengintimidasi karyawan lain

Kewajiban karyawan pada masyarakat luas :

- Memberikan perhatian pada kesehatan lingkungan

*Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang berhubungan dengan perusahaan (stakeholders). Diharapkan hal ini akan segera bisa dirumuskan lebih lanjut dan diterapkan dalam perusahaan-perusahaan.

### **2.3.6. Manfaat *Good Corporate Governance***

Beberapa manfaat *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.  
  
Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal, yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada public luas dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh

perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan .

Manfaat Good Corporate Governance ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global.

### **2.3.7. Tujuan Good Corporate Governance yaitu :**

Pertama, Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dan keadilan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional

Kedua, untuk mendorong agar pengelola perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian pengelola perusahaan.

Ketiga, mendorong agar pengelola perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalani tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab social perusahaan terhadap *stakeholder* maupun kelestarian lingkungan sekitar perusahaan, selanjutnya untuk meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional, dan meningkatkan iklim investasi nasional.

## **2.4.Praktek Good Corporate Governance**

### **2.4.1.Ukuran KAP**

Ukuran KAP digunakan untuk mengukur kualitas audit, dimana jika perusahaan di audit oleh KAP Big4 (KAP besar) maka kualitas auditnya tinggi dan jika diaudit oleh KAP non Big4 (KAP kecil) maka kualitas auditnya rendah.

Selama periode penelitian 1995-2002 terdapat perubahan jumlah KAP besar. Dari tahun 1995-1998 terdapat 6 KAP besar (Big 6) tahun 1998-2002 terdapat 5 KAP (Big 5), dan sejak tahun 2002 terdapat 4 KAP besar (Big 4), untuk penyederhanaan, maka dalam penelitian ini hanya digunakan istilah KAP Big4

Selama periode penelitian 1995-2002 terdapat perubahan jumlah KAP besar. Dari tahun 1995-1998 terdapat 6 KAP besar (Big 6) tahun 1998-2002 terdapat 5 KAP (Big 5), dan sejak tahun 2002 terdapat 4 KAP besar (Big 4), untuk penyederhanaan, maka dalam penelitian ini hanya digunakan istilah KAP Big4. Yang termasuk ke dalam empat atau enam KAP terbesar telah melakukan perubahan nama, KAP-KAP tersebut adalah sebagai berikut :

1. KAP, Prasetio, Sarwoko & Sandjaja. KAP ini merupakan penggabungan antara KAP Prasetio, Utomo & Rekan dengan KAP Handi, Sarwoko & Sandjaja. Penggabungan terjadi pada tanggal 26 Agustus 2002 karena terkait dengan kasus Enron Corp. Pada awal terbentuknya KAP ini terdiri atas 18 Akuntan Publik dengan 11 Akuntan Publik dengan 11 Akuntan Publik berasal dari KAP Prasetio, Utomo & Rekan.

2.KAP Osman, Ramli, Satrio & Rekan KAP ini terbentuk dari adanya perubahan anggota dalam persekutuan. Pada tahun 2000, KAP ini bernama KAP Has, Tuanakotta & Mustofa. Pada tanggal 27 Juni 2003, KAP ini berganti nama menjadi KAP Hans, Tunakotta, Mustofa & Halim dengan jumlah Akuntan Publik sebanyak 22 Akuntan Publik dengan 16 diantaranya berasal dari KAP Hans, Tuanakotta & Mustofa. Saat terbentuknya pada tanggal 4 Agustus 2005, KAP Osman, Ramli, Satrio & Rekan terdiri dari 24 Akuntan Publik dengan 17 diantaranya berasal dari KAP Hans, Tuanakotta, Mustofa & Halim.

3.KAP Siddharta, Siddharta & Widjaja. KAP ini terbentuk pada tanggal 9 April 2003, sebelumnya KAP ini bernama KAP Siddharta, Siddharta & Harsono. Perubahan nama terjadi karena adanya perubahan susunan anggota persekutuan. Pada awal terbentuknya, KAP ini terdiri dari 7 Akuntan Publik yang empat diantaranya berasal dari KAP Siddharta, Siddharta & Harsono.

4.KAP Hedrawinata Gani & Rekan. Terbentuk pada tanggal 27 Juli 2004, terdiri dari 13 Akuntan Publik dengan 7 diantaranya berasal dari KAP Hendrawinata & Rekan.

5.KAP Haryanto Sahari & Rekan KAP ini terbentuk pada tanggal 13 April 2004 yang terdiri dari 10 Akuntan Publik. Sebelumnya KAP ini bernama KAP Hadi Sutanto & Rekan dengan jumlah Akuntan Publik sebanyak 6 orang. Perubahan terjadi karena

adanya 2 Akuntan Publik yang mengundurkan diri dari penambahan 6 Akuntan Publik baru yang sebelumnya merupakan pegawai KAP Hadi Sutanto & Rekan.

6.KAP Aryanto, Amir, Jusup & Mawar. KAP ini terbentuk juga karena adanya perubahan dalam keanggotaan persekutuan. Sebelum tanggal 28 September 2004, KAP ini bernama KAP Amir Abadi Jusuf & Aryanto yang terdiri dari 9 Akuntan Publik. Dengan mundurnya dua orang Akuntan Publik KAP ini kemudian berganti nama menjadi KAP Aryanto, Amir, Jusuf & Mawar.

7.KAP Johan, Molanda, Astika & Rekan. KAP ini terbentuk pada 24 Oktober 2004. Sebelumnya KAP ini bernama KAP Johan, Molanda & Rekan. Pada awal terbentuknya KAP ini terdiri dari 10 Akuntan Publik dimana 5 diantaranya berasal dari KAP Johan, Molanda & Rekan dan selebihnya berasal dari KAP-KAP lain.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut dan perubahan nama serta komposisi Akuntan Publik yang terjadi pada empat dan enam KAP yang tergolong KAP besar berdasarkan jumlah klien audit dan jumlah total asset klien audit, maka hanya KAP Haryanto Sahari & Rekan saja yang dapat dikatakan sebagai KAP baru, sedangkan KAP yang lain merupakan kelanjutan dari KAP yang lama karena 50 % atau lebih Akuntan Publiknya berasal dari KAP sebelumnya.

#### 2.4.2. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independent adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. Bursa Efek Jakarta mewajibkan perusahaan memiliki komisaris independent yang diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang independent, obyektif dan menempatkan kesetaraan sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya.

Proporsi dewan komisaris dalam perusahaan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, cepat dan dapat bertindak secara independent. Menurut peraturan pencatatan nomor I-A tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas di bursa, yaitu jumlah komisaris independent minimal 30% atau minimal terdapat satu orang.

Komisaris independent bertanggung jawab untuk mendorong secara proaktif agar dewan komisaris dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dan bertindak sebagai penasehat direksi serta memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut, memastikan bahwa perusahaan dikelola oleh orang-orang yang professional, memastikan perusahaan memiliki informasi, system pengendalian, dan system audit yang bekerja dengan baik, memastikan perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya, memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi

dan dikelola dengan baik serta memastikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dipatuhi dengan baik.

Dalam perspektif hukum terdapat acuan yang menjadi dasar menjadi landasarnya adanya komisaris independent, pertama acuan tentang kedudukan komisaris dalam suatu perseroan terbatas seperti yang diatur dalam pasal 94 s/d101 UUPT No.1/1995; kedua, ketentuan pasal 80 UU no.8/1995 tentang pasar modal, yaitu tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar dan menyesatkan, dimana komisaris termasuk pihak yang diancam oleh pasal tersebut, baik ikut menandatangani setiap dokumen yang berhubungan dengan penyampaian informasi kepada public didalam rangka pernyataan pendaftaran. Bagi setiap calon emiten yang akan mencatatkan saham di Bursa Efek Jakarta, maka PT. Bursa Efek Jakarta mewajibkan adanya komisaris independent didalam kepengurusan emiten tersebut; ketiga, adanya pedoman yang dikeluarkan Komite Nasional *Good Corporate Governance* sehubungan kehadiran komisaris independent yang ada di perusahaan public, dimana dibagian II.1 menyebutkan bahwa pada prinsipnya komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi jika diperlukan.

Untuk membantu komisaris independent dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang ditetapkan sendiri, maka seorang komisaris independent dapat meminta nasihat dari pihak ketiga dan atau membentuk komite khusus yang disebut komite audit independent.

Terdapat hal lain mengenai komposisi dewan komisaris independent yang merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan

informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan komisaris independent dianggap dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas. Pemikiran ini didukung hasil penelitian Vafeas (2000) dan Anderson et al. (2003) Dalam Budiono (2005). Hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa komposisi dewan komisaris di perusahaan dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan.

Berikut beberapa kriteria yang paling tidak harus dimiliki oleh komisaris independen antara lain :

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali
2. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan atau komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.
3. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan
4. Tidak menduduki jabatan eksekutif pada perusahaan dan perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu tiga tahun terakhir.
5. Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan lainnya yang terafiliasi.
6. Tidak memiliki hubungan yang mengikat dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang terafiliasi kecuali hanya sebagai komisaris independent.

7. Tidak menjadi pemasok dan pelanggan signifikan dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang terafiliasi.

Sebagai seorang professional, seorang komisaris independent juga harus memiliki kompetensi pribadi sebagai pendukung agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu (1) Memiliki integritas dan kejujuran yang tidak pernah diragukan. (2) Memahami seluk beluk pengelolaan bisnis dan keuangan perusahaan. (3) Memahami dan mampu membaca laporan keuangan perusahaan dan implikasinya terhadap strategi bisnis (4) Memahami seluk-beluk industri yang dilakukan perusahaan. (5) Memiliki kepekaan terhadap perkembangan lingkungan yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan. (6) Memiliki wawasan luas dan kemampuan berfikir strategis. (7) Memiliki karakter sebagai pemimpin yang professional. (8) Memiliki kemampuan berkomunikasi serta kemampuan untuk mempengaruhi dan bekerjasama dengan orang lain. (9) Memiliki komitmen dan konsisten dalam melakukan profesinya sebagai komisaris independent. (10) Memiliki kemampuan untuk berfikir obyektif dan independent secara professional.

#### 2.4.3. Komite Audit Independen

Komite audit independent adalah suatu komite yang berperan untuk memberikan evaluasi yang independent terhadap pelaporan keuangan perusahaan, yang anggotanya sebagian besar terdiri dari pihak luar perusahaan (Purwanto, 2001) dalam Radita (2006). Sesuai dengan pedoman *Good Corporate Governance*, dewan

komisaris independent wajib membentuk komite audit independent sebagai sub komite dari dewan komisaris independent yang diharapkan berfungsi efektif dalam hal-hal yang terkait dengan proses dan peran audit bagi perusahaan terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dipaparkan untuk public

Secara formal komite audit independent diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1995, melalui SK direksi Bank Indonesia, yang mewajibkan kepada bank-bank di Indonesia untuk membentuk komite audit independent tersebut. Saat ini di Indonesia, melalui surat edaran PT. Bursa Efek Jakarta nomor SE-008/BEJ/12 2001 tanggal 7 Desember 2001 telah diatur mengenai keanggotaan komite audit independent dengan anggota komite audit independent yang berasal dari pihak eksternal. Selain itu, peraturan yang menyangkut keindependenan komite audit independent diatur melalui surat edaran Bapepam nomor SE-03/PM/2000. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa komite audit independent sedikitnya terdiri dari tiga orang dan diketuai oleh komisaris independent perusahaan dengan beranggotakan dua orang eksternal yang independent terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

#### 2.4.3.1. Tugas utama pembentukan komite audit independent

Tugas utama dan tujuan dibentuknya komite audit independent menurut Price Waterhouse (1980) yng dimuat dalam McMullen (1996) dalam Radita (2006), adalah meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang bisa di capai dengan : (1)

Mengawasi proses penyusunan laporan keuangan yang meliputi system pengendalian intern. (2) Mengawasi proses pemeriksaan internal dan eksternal.

Jadi dengan kata lain, keberadaan komite audit independent diharapkan dapat:

(1) Mengurangi ketidaktepatan pengukuran akuntansi yang disengaja maupun tidak disengaja (2) Mengurangi ketidakcukupan *disclosure* yang disengaja maupun yang tidak disengaja.(3) Mengurangi kecenderungan kesalahan yang dilakukan manajemen dan praktek yang melawan hukum.

#### 2.4.3.2.Tugas komite audit independent menurut Bapepam

Komite audit independent dipandang sebagai mekanisme monitoring yang diharapkan mengurangi asimetri antara manajemen, dewan komisaris dan pemegang saham. Sedangkan menurut Bapepam tujuan pembentukan komite audit independent adalah membantu dewan komisaris untuk :

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dan pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

#### 2.4.3.3.Peranan dan tanggung jawab komite audit independent

Peranan dan tanggung jawab komite audit independent berkaitan dengan *Good Corporate Governance* menurut Alijoyo (2003) dalam Radita (2006), mencakup:

1. Pengawasan terhadap proses *Good Corporate Governance* di Perusahaan.
2. Memastikan bahwa manajemen puncak mempromosikan budaya yang kondusif bagi terciptanya *Good Corporate Governance*
3. Memahami semua permasalahan yang dapat mempengaruhi baik kinerja keuangan maupun non keuangan.
4. memonitor kepatuhan terhadap segala undang-undang maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku untuk perusahaan.
5. Meminta agar auditor internal melaporkan secara tertulis setiap enam bulan sekali mengenai cakupan review terhadap praktek *Good Corporate Governance* di perusahaan dan memberikan laporan bila terdapat penyimpangan yang serius.

Jadi, secara garis besar tugas dan tanggung jawab komite audit independent dapat dikelompokkan dalam tiga bidang, yaitu pelaporan keuangan, manajemen pengendalian dan resiko dan *Good Corporate Governance*.

Menurut Hidayati (2000) dalam Radita (2006), terdapat beberapa factor yang mempengaruhi efektivitas komite audit independent dalam melaksanakan tugasnya, yaitu pernyataan secara tertulis dan misi komite, pemimpin komite yang kuat, evaluasi kinerja dan independensi serta kualifikasi anggota komite audit independent. Yang termasuk factor fundamental atas kesuksesan komite audit independent adalah komposisi anggotanya yang meliputi independensi dan kalsifikasi anggotanya. Anggota yang independent adalah anggota komite yang

tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan perusahaan dan afiliasinya serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan apapun dengan direksi dan komisaris perusahaan. Nama anggota komite audit independent juga harus diumumkan ke publik luas sehingga terjadi kontrol sosial mengenai keindepedenan mereka.

#### 2.4.3.4. Syarat keanggotaan komite audit independent

Terdapat beberapa syarat keanggotaan komite audit independent meliputi:

1. Para anggota secara bersama-sama memiliki keseimbangan antara skill dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai bisnis secara umum.
2. Anggota dari komite audit independent harus independent, obyektif dan professional.
3. Anggota dari komite audit independent harus memiliki integritas, dedikasi, pemahaman yang baik tentang organisasi, pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnis dan pemahaman yang baik tentang resiko dan pengendalian.
4. Sedikitnya satu anggota komite audit independent memiliki pemahaman yang baik mengenai laporan keuangan perusahaan.
5. Diatas semua persyaratan diatas, ketua komite audit independent harus memiliki kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang sangat bagus dan efektif.

Hal lain yang juga sangat penting berkaitan dengan efektivitas dari komite audit independent adalah *charter* komite audit independent yang merupakan dokumen tertulis yang secara jelas mendefinisikan peran dan tanggung jawab komite audit independent serta kerangka kerja fungsional mereka. Komite audit independent harus memiliki *charter* komite audit independent untuk digunakan sebagai rujukan internal tentang bagaimana sebaiknya mereka mengatur diri sendiri sehingga tujuan terbentuknya komite audit independent di perusahaan tercapai.

Pernyataan misi komite secara tertulis ini diperlukan sebagai panduan setiap anggota komite agar tetap menyadari tugas apa yang seharusnya mereka lakukan. *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI) membagi dan mengelompokkan elemen-elemen umum dan dasar yang harus ada dalam *charter* komite audit independent menjadi tujuh elemen sebagai berikut : (1) Tujuan umum dan otoritas komite audit independent. (2) Peran dan tanggung jawab komite audit independent (3) Struktur komite audit independent (4) Syarat-syarat keanggotaan (5) Rapat-rapat komite audit independent (6) Pelaporan komite audit independent. (7) Kinerja komite audit independent.

Dalam penelitian ini *Good Corporate Governan* (GCG) merupakan *construkt* dan diprosikan dengan, ukuran KAP, keberadaan komite audit independent dan proporsi dewan komisaris independent.

## 2.5. Hipotesis Penelitian

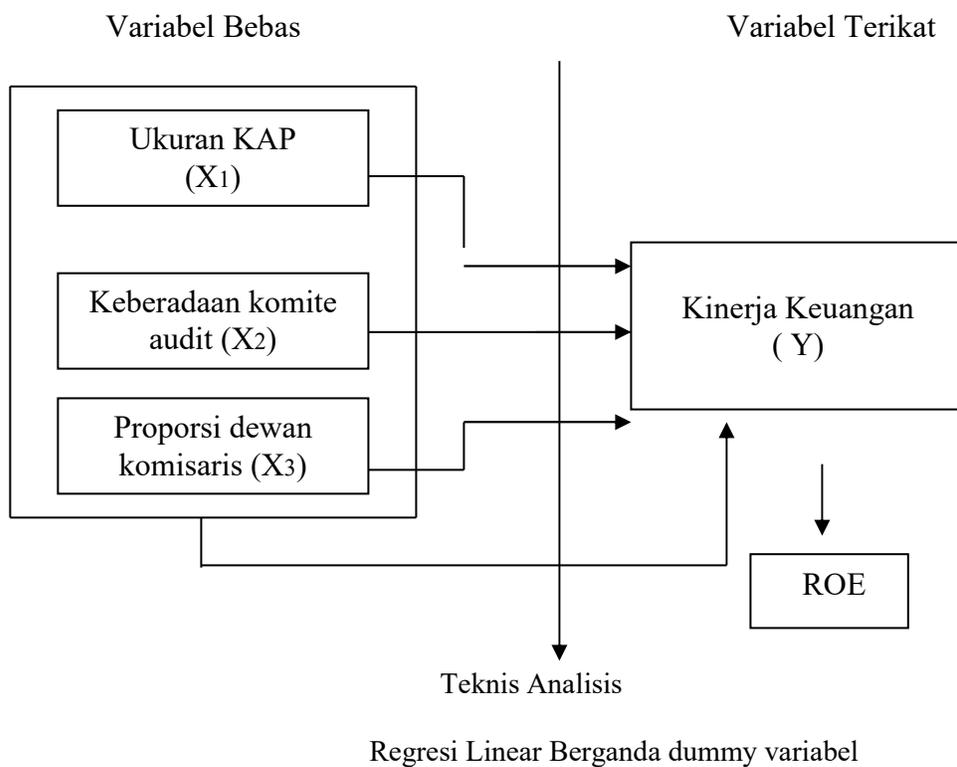
Berdasarkan Landasanteori yang telah disampaikan diatas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

*H1: Penerapan Good Corporate Governance dalam hal ini keberadaan Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan*

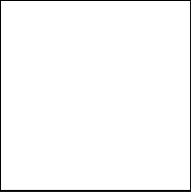
*H2: Penerapan Good Corporate Governance dalam hal ini kebaradaan Komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan*

*H3: Penerapan Good Corporate Governance dalam hal ini proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan*

## 2.6. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka pikir



Dalam alur kerangka pikir tersebut diatas terdapat tiga variabel bebas yaitu : X1, Ukuran KAP, X2 Dewan komisaris Independen dan Keberadaan Komite X3 serta satu variabel terikat yaitu Kinerja Keuangan Y. Untuk mencari ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas X1 Ukuran KAP, X2 Komite audit, X3 Proporsi dewan komisaris terhadap variabel terikat Kinerja Keuangan dengan menggunakan regresi linear berganda.